

ALTERNATIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA PONTIANAK STUDI KASUS PERTANIAN LIDAH BUAYA

Dicky Kurniawan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat
JL. Jenderal A. Yani No.2 Pontianak
E-mail: dicky.kurniawan.1460@facebook.com

Abstrak

Kecamatan Pontianak Utara (Kota Pontianak) memiliki sentra budidaya lidah buaya (Aloe vera sp) yang menjadi icon pertanian di kota tersebut. Pertanian lidah buaya akan menciptakan multiplier ke hilir dan ke hulu yang berpotensi mengembangkan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara. Tujuan artikel ini adalah mengkaji peran pertanian lidah buaya bagi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pontianak Utara, yang ditelusuri melalui kajian: peran makro (peran pertanian terhadap pendapatan dan tenaga kerja wilayah) dan peran mikro (kesejahteraan dan pola belanja petani). Metode analisis yang digunakan meliputi: LQ, shift-share, pengganda (pendapatan dan tenaga kerja), dan analisis deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa secara makro (wilayah) peran pertanian lidah buaya masih terbilang kecil, dan secara mikro (rumah tangga) telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan multiplier meskipun dalam jumlah yang belum begitu besar. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran pertanian lidah buaya bagi ekonomi Kecamatan Pontianak Utara (Kota Pontianak), mengingat keunggulan dari pertanian lidah buaya dan kondisi wilayah yang menunjang.

Kata kunci: lidah buaya, pertanian, pengembangan ekonomi lokal, Kota Pontianak

Abstract

District of North Pontianak (Pontianak City) is the centers of aloe vera cultivation (Aloe vera sp) that became city's icons of agriculture. Aloe vera farming will create a multiplier to the downstream and upstream of local economy and has the potential to develop Northern District of Pontianak. The purpose of this article was to analyze the role of aloe vera farming for local economic development in the District of North Pontianak, the role of the macro (the role of agriculture for income and employment areas) and the role of micro (farmers' welfare and spending patterns). Analytical methods used include: LQ, shift-share, multiplier (income and labor), and descriptive analysis. The article shows that at the macro level (region) the agricultural role of aloe vera are relatively small and the micro (household) have contributed in improving the welfare of farmers and create a multiplier even though the amount has not been so great. This article provides recommendations for improving the agricultural role of aloe vera to the economy of North District Pontianak (Pontianak), considering the benefits of aloe vera farming and the conditions that support the region.

Keywords: aloe vera, agriculture, local economic development, Pontianak City

1. Pendahuluan

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) muncul sebagai sebuah strategi baru dalam pengembangan wilayah. Dalam konsep ini, masyarakat menentukan apa dan bagaimana masa depan mereka sendiri, mengidentifikasi potensi (sumber daya) lokal, dan memikirkan

aktivitas ekonomi seperti apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Menurut Blakeley (1989), tujuan utama dari pengembangan ekonomi lokal adalah menciptakan dan meningkatkan jumlah dan jenis lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan keterampilan dan keahlian masyarakat lokal. Semakin berkembang

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan petunjuk bahwa wilayah sedang mengalami perkembangan.

Kota Pontianak merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, di Kecamatan Pontianak Utara terdapat sentra budidaya lidah buaya (*Aloe vera sp*) yang menjadi *icon* pertanian di kota tersebut, bahkan Provinsi Kalimantan Barat. Produksi lidah buaya (*Aloe vera sp*) di Kecamatan Pontianak Utara dapat dikatakan tinggi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2001, produksi lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara 7.726 ton dan meningkat hingga 14.346 ton pada tahun 2005. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu empat tahun, produksi lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara meningkat hampir dua kali lipat.

Lidah buaya (*Aloe vera sp*) asal Kecamatan Pontianak Utara merupakan komoditas ekspor dengan tujuan: Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Volume ekspornya pun terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2001, produksi yang diekspor 518 ton, dan pada tahun 2004 mencapai 1.202 ton (mencapai dua kali lipat dari volume produksi tahun 2001). Dari lahan seluas 800 Ha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagai Kawasan Sentra Agribisnis, 136 Ha diantaranya telah ditanami dan 80 Ha (640.000 tanaman) telah menghasilkan pelepah lidah buaya dengan rata-rata produksi mencapai 640 ton per bulan (artinya tiap 1 hektar mampu memproduksi 8 ton lidah buaya). Jika harga rata-rata lidah buaya dari petani Rp1.000 per kilogram, maka nilai rupiah yang masuk ke petani mencapai

0,64 Milyar per bulannya (Pontianak Post, 2007). Nilai ini akan semakin besar mengingat adanya keterkaitan antara pertanian lidah buaya dengan kegiatan di sektor hulu maupun hilir. Sebagai ilustrasi, di dalam pertanian lidah buaya tentunya terdapat petani dan aliran uang (kapital) serta tenaga kerja lainnya yang terlibat. Ke hulu, pertanian lidah buaya memerlukan penyediaan bahan baku produksi. Ke hilir, pertanian lidah buaya mendorong berkembangnya industri yang mengolah hasil pertanian lidah buaya. Pada waktu bersamaan, semua kegiatan tersebut akan meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja wilayah. Kondisi ini sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian lokal.

Sementara itu, belum banyak diketahui peran ekonomi dari pertanian lidah buaya, padahal pengetahuan tentang hal itu penting untuk menentukan masa depan pertanian tersebut dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga dibutuhkan suatu kajian. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pertanian lidah buaya bagi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pontianak Utara.

Pembahasan artikel ini terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang dan memaparkan fokus utama artikel ini. Bagian kedua membahas tentang pertanian dalam pengembangan ekonomi lokal, yang merupakan tinjauan teoritis pada artikel ini. Bagian ketiga adalah pemaparan mengenai pendekatan komoditas unggulan. Bagian keempat memaparkan analisis peran pertanian lidah buaya bagi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pontianak Utara. Bagian kelima adalah kesimpulan berdasarkan hasil artikel ini.

2. Pertanian dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan suatu konsep yang bertumpu pada lokalitas dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah (wilayah). Menurut Blakeley (1989):

“Local economic development is not merely new rhetoric, but represents a fundamental shift in the actors as well as activities associated with economic development. It is essentially a process by which local government and/or community-based group manage their existing resources and enter new partnership arrangements with the private sector, or with each other, to create a new jobs and stimulate economic activity in a well-defined economic zone.”

Serupa dengan definisi di atas, World Bank Urban Development Unit (2003) menyatakan bahwa:

“Local economic development is the process by which public, business and nongovernmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation.”

Lebih lanjut Coffey (1985) mengemukakan bahwa pada prinsipnya konsep pengembangan ekonomi lokal ditentukan oleh tumbuh-kembangnya kewirausahaan lokal yang ditunjang sistem kelembagaan lokal di wilayah tersebut, mencakup: industri, asosiasi kegiatan usaha, pengusaha lokal, pemerintah lokal, dan komponen lokal lainnya.

Terdapat dua poin penting yang harus digaribawahi dari pemahaman di atas. Pertama, PEL menekankan adanya perubahan mendasar pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang menentukan pembangunan, tetapi juga harus melibatkan aktor lain seperti masyarakat, dunia usaha, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) / *Non-Government Organization* (NGO), dan lain sebagainya. Menurut Helmsing (2001), PEL adalah multi sektor, mengacu pada sektor publik, sektor privat, dan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan PEL sangat ditentukan oleh kemampuan memobilisasi berbagai komponen lokal tersebut. Kedua, pembangunan yang dilakukan didasarkan atas potensi (sumber daya) lokal yang dimiliki. Pembangunan tidak akan seragam, karena tiap daerah berbeda potensi dan kondisinya.

Pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 – 1998, perekonomian nasional mengalami kemunduran besar. Kota-kota besar yang semula diharapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) nasional pada waktu itu mencapai -13,68 % (Nurzaman, 2002). Semua kota besar tersebut mengedepankan industri manufaktur sebagai sektor basis. Namun, pada situasi ketika ekonomi mengalami kehancuran, pertanian justru dinilai sebagai ”penyelamat” meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif kecil, yakni 0,26 %. Akibat krisis tersebut, penambahan jumlah penduduk miskin menjadi 80 % di perkotaan dan hanya 20 % yang terjadi di perdesaan (Argo, 2005). Sementara itu, 55 % tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian dan lebih dari 70 % penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Krisis menunjukkan bahwa sektor pertanian relatif memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan ekonomi internasional. Selain itu, pertanian juga memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Pada saat ini, isu ketahanan pangan nasional dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lahan Pertanian

Abadi semakin menegaskan tentang nilai strategis sektor pertanian dalam menjawab tantangan ekonomi nasional dan global.

Menurut Todaro (2000) dan Sumodiningrat (1999), ada beberapa peran strategis sektor pertanian terkait pengembangan ekonomi lokal di suatu wilayah, antara lain:

- a. *Pertanian menyerap tenaga kerja wilayah.* Kondisi ini dapat terjadi jika pertanian berkembang secara menyeluruh, meliputi: kegiatan hulu, kegiatan bertani itu sendiri, kegiatan hilir, dan kegiatan penunjang (transportasi, keuangan, kelembagaan, dan sebagainya). Selain itu, pertanian merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kultur masyarakat perdesaan (tujuan utama PEL tercapai).
- b. *Pertanian memenuhi kebutuhan pangan lokal.* Selain berpotensi sebagai komoditas ekspor, produk pertanian juga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Terkait PEL, hal ini jelas memberikan keuntungan karena akan memperkecil nilai impor melalui produk substitusi impor. Selisih antara nilai ekspor-impor merupakan nilai tambah yang diterima oleh wilayah tersebut.
- c. *Pertanian memacu pertumbuhan investasi wilayah.* Pertanian yang berkembang pesat akan menarik investor ke wilayah tersebut. Investasi merupakan satu dari tiga faktor (ekspor dan konsumsi lokal) penting yang dibutuhkan oleh wilayah untuk berkembang. Namun, investasi tersebut harus diarahkan pada sektor berbasis lokal. Industri yang berkembang adalah industri yang mengolah hasil pertanian lokal, bukan industri *foot-loose*. Apabila hal ini tidak terwujud, investasi yang dilakukan

justru memperbesar kebocoran wilayah (*region leakages*).

- d. *Pertanian sebagai pemerata kesenjangan wilayah (regional disparity).* Pertanian bisa dijadikan sebagai alat pembangunan desa-desa tertinggal mengingat hanya pertanian yang sesuai dengan kondisi (karakteristik) perdesaan. Pembangunan pertanian yang terencana dan dikelola dengan baik akan memacu perkembangan desa-desa tersebut, dan secara makro akan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan *sampling* untuk mengetahui permasalahan kesejahteraan petani, belanja petani, dan keterkaitan pertanian lidah buaya terhadap industri pengolahannya. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *simple random sampling* yang artinya setiap unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden. Dengan jumlah petani sebanyak 105 petani, jumlah sampel sebanyak 52 petani. Hasil ini didapat dengan menggunakan perhitungan Slovin dengan derajat kepercayaan 10%.

Untuk menganalisis peran pertanian lidah buaya bagi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pontianak Utara, dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan peran pertanian lidah buaya terhadap pendapatan wilayah, tenaga kerja wilayah. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk menjelaskan kesejahteraan petani lidah buaya dan pola belanja petani lidah buaya. Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis ekonomi Kecamatan Pontianak Utara. Metode yang digunakan adalah metode LQ, metode *shift share*, serta penganda

pendapatan. Metode LQ digunakan untuk menganalisis peran sektor pertanian di Kecamatan Pontianak Utara terhadap sektor yang sama di Kota Pontianak. Metode *shift share* digunakan untuk melihat kecenderungan perkembangan sektor pertanian di kecamatan serta faktor yang mempengaruhinya. Dalam analisis ini melihat pertumbuhan sektor terhadap pertumbuhan nasional, pergeseran proporsional, serta dari pangsa pasar per sektor di Kecamatan Pontianak. Selanjutnya, analisis pengganda pendapatan digunakan untuk menganalisis kemampuan sektor pertanian dalam menciptakan efek pengganda bagi ekonomi Kecamatan Pontianak Utara.

3. Pendekatan Komoditas Unggulan

Promosi komoditas unggulan penting bagi pengembangan ekonomi wilayah. Menurut Hendayana (2003), analisis komoditas unggulan memungkinkan perwujudan pembangunan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dimengerti karena pembangunan tidak dapat dilakukan secara serentak di semua sektor/komoditas. Dengan demikian, hanya sektor/komoditas unggulan saja yang mendapat prioritas utama untuk dikembangkan terlebih dahulu.

Banyak kriteria untuk menentukan komoditas unggulan suatu wilayah. Kriteria tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, teknis, fisik lingkungan, dan aspek legalitas. Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh kriteria penentuan komoditas unggulan dan pihak (instansi) yang menggunakannya.

Tim Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD) tahun 1997 dalam Sugito (2006), menjelaskan bahwa komoditas unggulan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: komoditas tersebut sesuai dengan kondisi lahan di suatu wilayah (dibutuhkan

analisis kesesuaian lahan); memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi agar tercipta efek pengganda sebesar-besarnya; daya permintaan yang tinggi dari luar wilayah.

Menurut Sugiyanto (2003), ada perbedaan dalam menentukan komoditas unggulan antara pemerintah kota/kabupaten dan Perbankan (Bank Indonesia). Pendekatan dari pemerintah kota/kabupaten meliputi kriteria sebagai berikut: merupakan produk khas di suatu wilayah; jumlah lapangan kerja (usaha) yang tercipta dari komoditas tersebut; komoditas tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara itu, pendekatan dari Perbankan (Bank Indonesia) meliputi pertimbangan: aspek teknis dan produksi; aspek sosial ekonomi dan lingkungan; aspek manajemen dan legalitas; aspek keuangan.

Dari beberapa referensi di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada standar dalam menentukan komoditas unggulan, tergantung pada sudut pandang dan aspek yang diprioritaskan. Kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan komoditas unggulan terkait PEL adalah: aspek sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan.

4. Analisis Peran Pertanian Lidah Buaya Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal di Kecamatan Pontianak Utara

Peran pertanian lidah buaya dianalisis melalui dua perspektif, yakni: perspektif wilayah dan perspektif rumah tangga petani. Pertama mengkaji peran pertanian lidah buaya secara kewilayahan. Unit analisisnya adalah kegiatan pertanian lidah buaya dan industri pengolahannya. Apa dan sejauh mana peran pertanian lidah buaya dalam mengembangkan perekonomian lokal merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab. Sementara itu, secara mikro akan dikaji peran pertanian lidah

buaya dengan unit analisis berupa rumah tangga petani. Apa dan sejauh mana peran pertanian lidah buaya dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab pada perspektif kedua.

Pertimbangan utama memilah peran pertanian di atas menjadi dua bagian didasarkan atas pengetahuan bahwa suatu sektor yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, belum tentu memberikan peran serupa terhadap para pelakunya, dalam studi ini adalah rumah tangga petani lidah buaya.

Analisis peran pada tingkat rumah tangga dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan sejumlah rumah tangga petani terkait persoalan kesejahteraan dan belanja petani lidah buaya. Indikator kesejahteraan yang digunakan mengacu pada versi Badan Pusat Statistik (BPS), yakni: pendapatan petani, kualitas jenis lantai, dan kepemilikan kendaraan bermotor.

4.1 Peran Pertanian Lidah Buaya terhadap Pendapatan Kecamatan Pontianak Utara

Tingkat produksi (produktivitas) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai performa suatu sektor/komoditas ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dimengerti karena produktivitas merupakan *resultant* dari faktor produksi yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, jika suatu sektor/komoditas memiliki produktivitas yang relatif tinggi dan stabil, dapat diartikan bahwa faktor-faktor produksi tersebut bekerja baik.

Pada tahun 2001, produksi lidah buaya mencapai 7.720 ton dan meningkat menjadi 16.156,8 ton pada tahun 2004. Namun, pada tahun berikutnya produksi lidah buaya justru

mengalami penurunan menjadi 7.776 ton pada tahun 2006. Penurunan produksi lidah buaya disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor produksi dan pasca produksi. Harga pupuk yang meningkat (mahal) merupakan persoalan utama dalam produksi lidah buaya.



Gambar 1
Perkembangan Produksi Lidah Buaya
Kecamatan Pontianak Utara Tahun
2001 – 2006 (dalam Ton)

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Terminal Agribisnis, Dinas Pertanian Kota
Pontianak, 2006

Pada pasca produksi, turunnya harga jual lidah buaya dan keterbatasan pemasaran merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh petani. Ada empat kemungkinan bagi petani lidah buaya dalam menjual hasil produksi, yakni: ke Perseroan Terbatas (PT.), PT. Niramas (cabang PT. Inaco), ke pasar lokal, ke industri rumah tangga (*home industry*), dan ekspor ke luar negeri. PT. Niramas merupakan industri besar yang mengolah lidah buaya mentah menjadi minuman kemasan, 99 % produknya diekspor ke Jepang. Berdasarkan survei diketahui bahwa hampir seluruh petani (dari 52 responden) menjual hasil produksi mereka ke PT. Niramas dan kios pasar minggu yang ada di Kelurahan Siantan Hulu (Kecamatan Pontianak Utara). Hanya sedikit petani yang menjual hasil produksi ke *home industry* atau ekspor ke luar negeri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertanian lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara hanya melibatkan

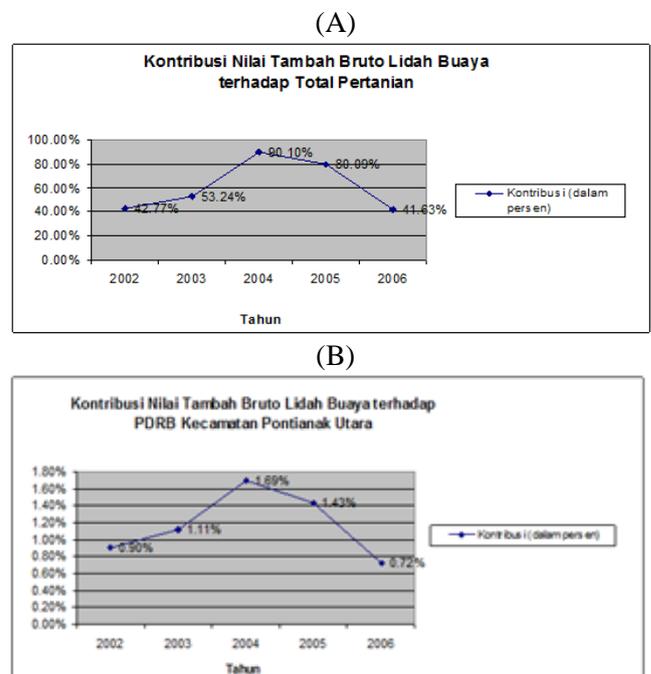
beberapa pelaku usaha dan pembeli (pasar) saja yang dikenal dengan pasar oligopsoni.

Sebelum tahun 2004 (masa *booming* pertanian lidah buaya), harga jual lidah buaya dengan *grade A* ke PT. Nirmas Rp1.200/kg. Hal ini mendorong para petani untuk berbondong-bondong menanam lidah buaya sehingga jumlah produksi lidah buaya pada saat itu mencapai titik tertingginya. Selain itu, harga pupuk juga belum meningkat seperti saat ini sehingga petani akan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena harga jual dan permintaan yang relatif tinggi sementara biaya produksi masih relatif rendah.

Setelah tahun 2004 sampai saat ini, harga jual lidah buaya mengalami penurunan menjadi Rp800/kg untuk PT. Nirmas dengan *grade A*, Rp1.000/kg untuk pasaran lokal dan ekspor ke luar negeri via Jakarta. Untuk PT. Nirmas, penurunan harga jual yang mampu dibeli oleh pabrik tersebut dari Rp1.200/kg menjadi Rp800/kg disebabkan oleh menurunnya permintaan (*demand*) akan produk olahan yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Dengan harga bahan baku (lidah buaya mentah) yang tinggi ditambah dengan harga bahan pendukung lainnya (misalkan harga gula pasir) yang semakin meningkat, mengakibatkan harga jual produk minuman yang dihasilkan juga semakin tinggi dan kurang kompetitif di pasar. Kondisi ini jelas mempengaruhi produktivitas petani setempat mengingat industri ini berperan sebagai pasar lidah buaya terbesar dari petani di kecamatan tersebut.

Menurunnya produksi lidah buaya mengurangi nilai tambah yang diciptakan oleh komoditas tersebut bagi pengembangan ekonomi kecamatan. Pada tahun 2001, nilai tambah lidah buaya mencapai Rp7.287,9 juta, meningkat Rp9.929,9 juta pada tahun 2003, dan mencapai puncaknya pada tahun 2004

Rp15.718,7 juta. Sayangnya, nominal ini kemudian menurun menjadi Rp13.907,9 juta pada tahun 2005 dan terus menurun drastis menjadi Rp 6.113,9 juta pada tahun 2007. Penurunan nilai tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya produksi lidah buaya selama beberapa tahun terakhir. Kerugian tidak hanya dialami oleh para petani lidah buaya saja, tetapi juga oleh seluruh pelaku lain mengingat pertanian adalah suatu “industri” yang memiliki keterkaitan baik ke hulu maupun ke hilir.



Gambar 2
Kontribusi Lidah Buaya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertanian Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2002 – 2006 (dalam Persen)
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari Gambar 2 (A) dapat dilihat perkembangan kontribusi nilai tambah lidah buaya terhadap PDRB sektor pertanian Kecamatan Pontianak Utara. Pada tahun 2002, nilai kontribusi tersebut 42,8 % dan mencapai titik tertingginya pada tahun 2004 yakni 90,1 %. Hal ini mudah dipahami mengingat jumlah produksi lidah buaya mencapai titik

tertingginya pada tahun 2004. Nilai kontribusi ini kemudian menurun menjadi 80,1 % di tahun 2005, dan semakin menurun menjadi 41,6 % pada tahun 2006.

Dari Gambar 2 (B) dapat dilihat bahwa kontribusi tertinggi lidah buaya hanya 1,7 % pada tahun 2004 dan menurun menjadi 0,7 % pada tahun 2006. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat yang menetapkan lidah buaya sebagai komoditas unggulan pertanian di Kota Pontianak. Pemerintah bersama-sama dengan pihak terkait lainnya harus mampu mencari solusi atas persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya, baik itu solusi yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan tentunya jangka panjang.

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa pada prinsipnya pertumbuhan suatu wilayah terjadi karena adanya efek pengganda (*multiplier effects*) dari kegiatan unggulan di suatu wilayah. Kekuatan efek pengganda secara matematis ditentukan dari besar nilai pengganda yang mampu diciptakan. Oleh karena itu, berikut ini akan ditampilkan nilai pengganda pendapatan pertanian lidah buaya Kecamatan Pontianak Utara selama tahun 2002-2006.

Tabel 1
Pengganda Pendapatan Jangka Pendek
Pertanian Lidah Buaya Kecamatan Pontianak
Utara Tahun 2002 – 2006

Tahun	Pendapatan Total (Y) (dalam juta)	Pendapatan Basis (YB) (dalam juta)	Pendapatan Non Basis (YN) (dalam juta)	YN/ Y	1- YN /Y	Pengganda (Ms=1/(1- YN/Y))
2002	Rp864,132.39	Rp7,769.91	Rp856,362.48	0.99	0.01	111.2
2003	Rp891,375.07	Rp9,929.91	Rp881,445.16	0.99	0.01	89.8
2004	Rp929,493.87	Rp15,718.71	Rp913,775.16	0.98	0.02	59.1
2005	Rp972,434.93	Rp13,907.91	Rp958,527.02	0.99	0.01	69.9
2006	Rp1,022,119.44	Rp7,337.91	Rp1,014,781.53	0.99	0.01	139.3

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 nilai pengganda pendapatan lidah buaya 111,2, menurun menjadi 59,1 pada tahun

2004, dan kemudian meningkat menjadi 139,3 pada tahun 2006. Nilai 139,3 pada tahun 2006 memberikan arti bahwa setiap penambahan 1 unit sektor pertanian lidah buaya akan menghasilkan pendapatan wilayah sebesar 139,3 unit. Dengan kata lain, jika pertanian lidah buaya memperoleh peningkatan pendapatan Rp1 juta, maka pendapatan Kecamatan Pontianak Utara juga akan meningkat Rp139,3 juta.

4.2 Peran Pertanian Lidah Buaya terhadap Tenaga Kerja Kecamatan Pontianak Utara

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio tenaga kerja pertanian lidah buaya terhadap sektor pertanian mengalami penurunan yakni 4,8 % pada tahun 2005, 4,4 % pada tahun 2006, dan 4,1 % pada tahun 2007. Sementara itu, rasio tenaga kerja pertanian lidah buaya terhadap tenaga kerja wilayah jauh lebih kecil yakni 0,2 % sepanjang tahun 2005 – 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran pertanian lidah buaya terhadap ekonomi lokal masih terlalu kecil dari sisi penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini belum sejalan dengan kebijakan ditetapkannya lidah buaya sebagai komoditas unggulan wilayah.

Tabel 2
Kontribusi Pertanian Lidah Buaya terhadap
Tenaga Kerja Pertanian dan Kecamatan
Tahun 2005 – 2007 (dalam Persen)

Tahun	Tenaga Kerja Pertanian Lidah Buaya (jiwa)	Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kec. Pontianak Utara (jiwa)	Total Tenaga Kerja Kec. Pontianak Utara (jiwa)	Rasio A/B (persen)	Rasio A/C (persen)
	A	B	C		
2005	115	2375	49803	4.8	0.2
2006	109	2469	52645	4.4	0.2
2007	105	2552	55128	4.1	0.2

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio tenaga kerja pertanian lidah buaya terhadap sektor pertanian mengalami penurunan yakni 4,8 % pada tahun 2005, 4,4 % pada tahun 2006, dan

4,1 % pada tahun 2007. Sementara itu, rasio tenaga kerja pertanian lidah buaya terhadap tenaga kerja wilayah jauh lebih kecil yakni 0,2 % sepanjang tahun 2005 – 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran pertanian lidah buaya terhadap ekonomi lokal masih terlalu kecil dari sisi penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini belum sejalan dengan kebijakan ditetapkannya lidah buaya sebagai komoditas unggulan wilayah. Keberadaan industri ini memberikan efek positif bagi ekonomi wilayah, salah satunya dari penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3
Pengganda Tenaga Kerja Pertanian Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2007

Petani Lidah Buaya (Ep)	105
Tenaga Kerja Industri Pengolahan Lidah Buaya (Ei)	175
Total Tenaga Kerja Lokal Pertanian Lidah Buaya (E = Ep + Ei)	280
Rasio tenaga kerja industri pengolahan dengan total tenaga kerja lokal pertanian lidah buaya ($\hat{\alpha} = Ei/E$)	0.6
Multiplier ($1/1-\hat{\alpha}$)	2.7

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai pengganda pertanian lidah buaya untuk tahun 2008 sebesar 2,7 unit. Hal ini berarti jika terjadi penambahan 1 unit tenaga kerja di pertanian lidah buaya, maka akan terjadi penambahan tenaga kerja wilayah 2,7 unit. Atau, jika tenaga kerja pertanian bertambah 100 orang, maka tenaga kerja wilayah akan bertambah 270 orang. Angka ini adalah minimal, mengingat tidak diketahui total industri pengolahan lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara. Dengan demikian, pertanian lidah buaya berpotensi mengembangkan perekonomian lokal Kecamatan Pontianak Utara jika dikembangkan secara lebih intensif.

4.3 Bangkitan Kegiatan Pertanian Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara

Pertanian lidah buaya mampu mendorong berkembangnya kegiatan lain di Kecamatan Pontianak Utara. Kegiatan tersebut akan

meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi wilayah. Selain itu, bangkitan kegiatan juga berpengaruh pada keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Hal ini dipahami karena pertanian tidak dapat berkembang secara sendirian, perlu keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan kegiatan lainnya. Semakin besar bangkitan kegiatan (efek pengganda) yang tercipta, semakin berperan bagi wilayah.

Tabel 4
Industri Pengolahan Lidah Buaya di Kota Pontianak Tahun 2008

Nama Pemilik/Perusahaan	Tenaga Kerja (orang)	Lokasi Industri
Junaiba	4	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Lasminten	21	Kecamatan Pontianak Utara
Ajung	4	Kecamatan Pontianak Utara
Ana	5	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Ameng	4	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Syahrial	4	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Sasono	5	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Bong Chi Tung/A thung	3	Kecamatan Pontianak Utara
Juliana	3	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Kus Dian Lestari	4	Kecamatan Pontianak Utara
Sunani	4	Kecamatan Pontianak Utara
Iswara Marzuki	3	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Usman	4	Luar Kecamatan Pontianak Utara
Triple Aloe vera	4	Kecamatan Pontianak Utara
Pasar lokal	30	Kecamatan Pontianak Utara
PT. Niramas	105	Kecamatan Pontianak Utara
Total	207	

Sumber: Hasil Analisis, 2010

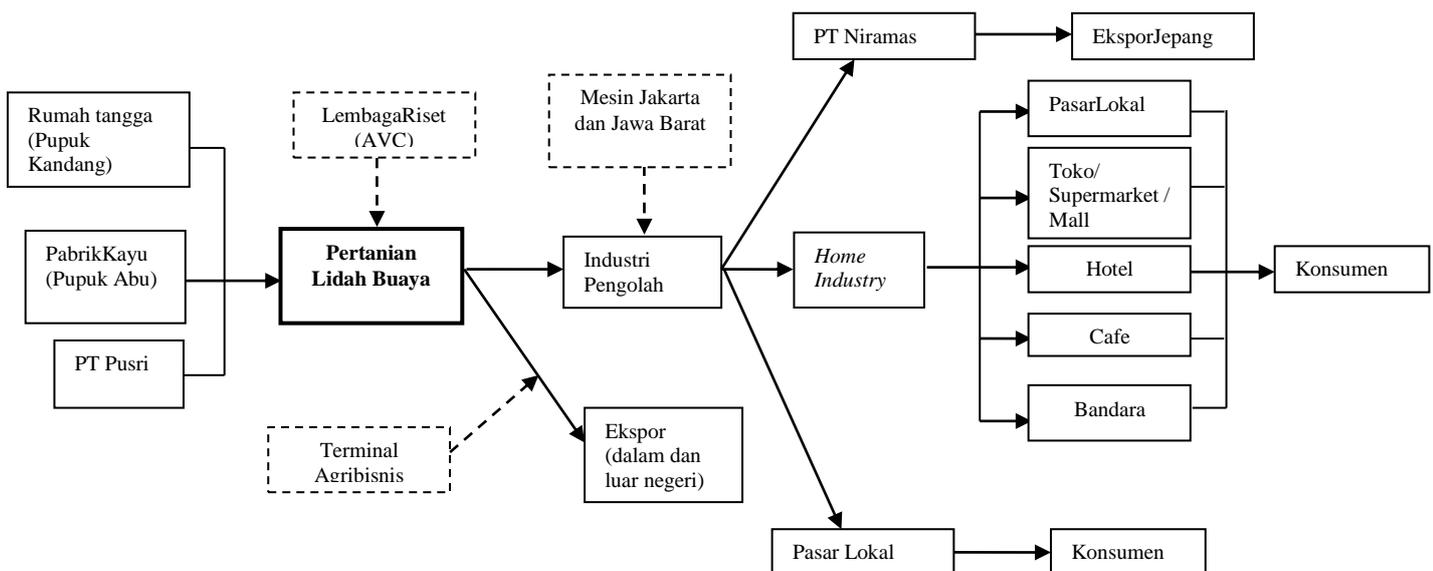
Pertanian lidah buaya membutuhkan input produksi berupa pupuk yang berasal dari rumah tangga, pabrik *sawmill*, dan PT. Pusri. Petani lidah buaya tidak hanya menggunakan satu jenis pupuk saja. Harga pupuk kandang dari rumah tangga Rp10 ribu/30 kg, pupuk abu dari pabrik *sawmill* Rp10 ribu/30 kg, pupuk NPK dan KCL Rp230 ribu/50 kg, dan pupuk urea Rp120 ribu/50 kg. Total nilai transaksi pupuk Rp162.240.000 per tahun untuk 52 responden petani. Terkait PEL, transaksi ini dinilai kurang menguntungkan bagi wilayah karena pabrik pembuat pupuk berlokasi di luar kecamatan atau bahan bakunya berupa impor (pabrik *sawmill* dan PT. Pusri).

Industri pengolahan lidah buaya menyerap tenaga kerja dari lingkungannya. Terkait PEL, jika terdapat banyak industri yang berlokasi di luar kecamatan, kebocoran wilayah akan semakin besar. Dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh tiap industri tersebut, akan diperoleh rasio antara tenaga kerja industri lokal terhadap tenaga kerja industri non lokal yakni 5,5. Hal ini berarti keberadaan industri pengolahan lidah buaya masih memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara.

Pasar bagi produk olahan lidah buaya masih terbatas di Kota Pontianak, meliputi: pasar-pasar lokal, toko/supermarket/mall, hotel, cafe,

dan bandara. Terbatasnya pasar menjadi persoalan utama bagi pertanian lidah buaya.

Sementara itu, kemampuan pertanian lidah buaya masih kecil dalam mendorong berkembangnya kegiatan transportasi dan keuangan. Petani dan pemilik industri cenderung menggunakan kendaraan pribadi dalam memasarkan produk lidah buaya. Untuk kebutuhan ekspor, petani biasanya menggunakan jasa Terminal Agribisnis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Karena kapasitas produksi yang belum besar, petani dan pemilik industri rumah tangga menggunakan modal sendiri dalam kegiatan produksinya. Secara Umum, bangkitan kegiatan pertanian lidah buaya di Pontianak Utara, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3
Peta Bangkitan Kegiatan Pertanian Lidah Buaya
Kecamatan Pontianak Utara
Sumber: Hasil Analisis, 2010

4.4 Kesejahteraan Petani Lidah Buaya

Indikator kesejahteraan yang digunakan mengacu pada versi Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini hanya menggunakan beberapa indikator yang relevan dengan konteks lapangan. Indikator tersebut antara lain:

pendapatan petani, kualitas jenis lantai rumah, dan kepemilikan kendaraan bermotor. Tiap indikator dilihat perubahannya dari sebelum menjadi petani lidah buaya sampai saat ini (sebagai petani lidah buaya), sehingga dapat disimpulkan peran pertanian lidah buaya dalam kesejahteraan petani.

Pendapatan merupakan indikator yang biasanya dilihat terlebih dahulu sebelum memperhatikan indikator lainnya. Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan bersih (netto), yakni pendapatan yang diperoleh dari selisih pendapatan bruto (nilai jual produksi) dengan ongkos produksi. Pendapatan netto merupakan pendapatan sesungguhnya yang diperoleh oleh petani.

Untuk memberikan arti terhadap angka pendapatan tersebut, digunakan dua besaran pembandingan, yakni: pendapatan per kapita Kota Pontianak dan belanja petani lidah buaya. Hal ini dimaksudkan agar diketahui apakah pendapatan tersebut termasuk kategori pendapatan tinggi secara rata-rata kota dan mampu membiayai berbagai kebutuhan dasar petani. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 5
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Pontianak Tahun 1996 – 2007 (dalam ribuan)

Uraian	1996	1999	2002	2004	2006	2007
Pendapatan per kapita	440,34	705,46	919,22	943,64	1072,94	1074,07

Sumber: Bappeda Kota Pontianak, 2007

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita Kota Pontianak pada tahun 2007 Rp.1.074.000. Jika kita bandingkan pendapatan per kapita tersebut dengan pendapatan petani, maka pendapatan petani lidah buaya berada di atas pendapatan per kapita Kota Pontianak. Lebih lanjut akan dilihat besarnya perubahan pendapatan petani sebelum menjadi petani lidah buaya dan sampai saat ini (sebagai petani lidah buaya). Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang hanya bersumber dari usaha tani lidah buaya, karena ada sebagian petani yang memiliki pekerjaan lain.

Tabel 6
Proporsi Perubahan Tingkat Pendapatan Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008

Peningkatan Pendapatan Petani Lidah Buaya (%)		
Berkurang	Tetap	Bertambah
9,6	17,3	73,1

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa 73,1 % (dari 52 responden) petani lidah buaya mengalami peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum menjadi petani lidah buaya. Pekerjaan sebagian besar responden sebelum bertani lidah buaya adalah petani sayuran, tukang bangunan, kerja upahan (serabutan), dan wiraswasta. Dengan demikian, pertanian lidah buaya memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan petani lidah buaya.

Hal penting berikutnya adalah apakah pendapatan tersebut sesuai dengan besar belanja petani lidah buaya. Dalam studi ini, besar belanja petani dihitung berdasarkan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, kredit kendaraan bermotor, dan biaya transportasi dan komunikasi setiap bulannya.

1. Jenis lantai

Jenis lantai yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik adalah lantai tanah, papan/kayu, semen, ubin/tegel, dan keramik. Asumsi dasar yang digunakan adalah semakin baik jenis lantai rumah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani. Perubahan jenis lantai rumah menunjukkan adanya perubahan kesejahteraan petani.



Gambar 4
Kualitas Jenis Lantai Rumah Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 7
Perubahan Jenis Lantai Rumah Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008

Kualitas Jenis Lantai (%)		
Berkurang	Tetap	Bertambah
0	71,2	28,9

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 7 menunjukkan bahwa peralihan profesi menjadi petani lidah buaya tidak banyak mengubah jenis lantai rumah petani di daerah tersebut. Beberapa faktor utama yang mungkin menyebabkan hal di atas terjadi adalah:

- Peningkatan pendapatan petani relatif kecil, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki jenis lantai rumah. Lebih baik pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak.
- Faktor lain adalah kondisi sosial budaya petani. Sebagian besar petani lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara adalah warga Cina dan migran dari Jawa. Etnis tersebut sangat cermat dalam perhitungan pengeluaran. Mereka tidak memaksakan diri untuk membeli berbagai kebutuhan yang menurut mereka kurang bermanfaat atau hanya sekedar meningkatkan status individu (pertimbangan *gensis*). Mereka menganggap bahwa lantai rumah berjenis papan sudah cukup layak untuk ditempati

sehingga tidak perlu untuk mengganti dengan jenis lantai lainnya.

2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Indikator ini merupakan informasi tambahan untuk mengukur peran pertanian lidah buaya dalam kesejahteraan petani. Perubahan kepemilikan kendaraan bermotor petani lidah buaya pada tahun 2008 (dari 52 responden) sebagai berikut:

Tabel 8
Perubahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008

Kepemilikan Kendaraan Motor (%)		
Berkurang	Tetap	Bertambah
0	21,2	78,9

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Faktor utama penyebab terjadinya peningkatan jumlah kendaraan motor selain pendapatan adalah adanya fasilitas kredit. Untuk saat ini, orang dapat membawa pulang sepeda motor dengan besar angsuran Rp.300.000-Rp.600.000 per bulan. Selain itu, transportasi umum yang ada di Kecamatan Pontianak Utara adalah bus kota dan angkot (oplet), tarif sekali perjalanan Rp.3.000. Petani menghabiskan biaya minimal Rp.180.000 untuk membiayai perjalanan pergi-pulang (PP) per bulannya. Nominal ini tidak terlalu jauh dengan besar angsuran/kredit motor per bulan disamping banyak kemudahan yang diperoleh jika memiliki kendaraan sendiri.

Sepeda motor digunakan untuk memasarkan lidah buaya mentah dalam jumlah kecil dan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan rumah tangga petani tersebut. Melihat pentingnya sepeda motor, membuat petani memberanikan diri untuk mengambil sepeda motor dengan segala konsekuensinya. Terlepas dari kondisi di atas, pertanian lidah buaya sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah

tangga petani jika dilihat dari peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor).

3. Belanja Kebutuhan Pangan

Enam puluh enam persen responden petani mengalokasikan pendapatannya Rp500.000 – Rp999.999 per bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan, 15 % petani dengan besar belanja Rp1.500.000 – Rp1.999.999, 13 % petani dengan besar belanja Rp1.000.000 – Rp1.499.999, dan 6 % petani dengan besar belanja Rp2.000.000 lebih. Sementara itu, pengeluaran per kapita per bulan Kota Pontianak pada tahun 2004 Rp619.700 dan pada tahun 2005 Rp620.700. Hal ini memberikan arti bahwa sebagian besar belanja pangan petani lidah buaya relatif sama dengan pengeluaran per kapita penduduk Kota Pontianak. Dari 52 responden yang diwawancarai, dapat dihitung total nilai belanja Rp56.250.000 per bulan atau Rp675.000.000 per tahun. Jika mengasumsikan proporsi nilai belanja di atas dapat berlaku untuk total 105 petani lidah buaya, maka kecamatan tersebut akan memperoleh Rp1.350.000.000 per tahunnya hanya dari belanja pangan petani. Nilai tersebut akan mengalir di dalam kecamatan itu saja, karena seluruh petani belanja kebutuhan pangan di pasar-pasar tradisional atau *minimarket* di dalam kecamatan.



Gambar 5

Proporsi Belanja Kebutuhan Pangan per Bulan Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008

Sumber: Hasil Analisis 2010

4. Belanja Kebutuhan Sandang

Sebanyak 35 petani (67,3 %) melakukan aktivitas belanja pakaian di pasar-pasar lokal yang ada di Kecamatan Pontianak Utara dan hanya 17 petani (32,7 %) yang membelanjakan uangnya di luar kecamatan. Hal ini dimengerti karena waktu tempuh antara lokasi pemukiman petani dengan pusat Kota Pontianak hanya ± 30 menit, sehingga petani memiliki pilihan untuk berbelanja di pasar yang lebih besar. Kegiatan belanja petani ini biasanya dilakukan satu tahun sekali atau menjelang hari raya agama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivitas belanja petani masih memberikan efek positif yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi lokal dengan total nominal mencapai Rp52.000.000 per tahun dari 67,3 % responden.



Gambar 6

Proporsi Belanja Kebutuhan Sandang/Pakaian per Tahun Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008

Sumber: Hasil Analisis, 2010

5. Belanja Kebutuhan Pendidikan

Gambar 8 menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak memiliki pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan, yakni 61 % dari 52 responden petani. Hal ini memberikan arti bahwa pendidikan belum dianggap penting. Banyak anak petani (khususnya etnis Cina) yang tidak bersekolah padahal mereka telah memasuki usia sekolah. Lebih lanjut diketahui bahwa sebagian besar pendidikan petani adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Kondisi ini

mungkin berpengaruh pada kualitas SDM, terutama terkait dengan kemampuan petani untuk berpikir secara rasional, memahami realitas yang ada, dan mencerna situasi yang terjadi yang kesemuanya itu akan berujung pada produktivitas lidah buaya.

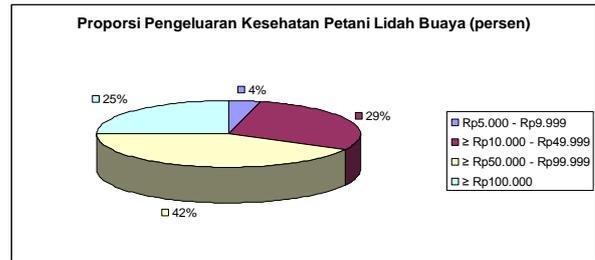


Gambar 7

Proporsi Belanja Kebutuhan Pendidikan per Bulan Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008
Sumber: Hasil Analisis, 2010

6. Belanja Kebutuhan Kesehatan

Selain tingkat pendidikan, kesehatan merupakan variabel penting yang digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambar 9 menunjukkan bahwa sebagian besar (49 %) biaya kesehatan petani berkisar Rp50.000 – Rp99.999 per satu kali berobat. Sebagian besar petani hanya mengalami beberapa penyakit ringan saja seperti batuk, demam, dan lain sebagainya. Hal menarik dalam kasus ini adalah sebagian besar petani telah memilih jalur medis untuk mengobati penyakit yang dialaminya, seperti mengunjungi Puskesmas atau tempat praktek dokter di Kecamatan Pontianak Utara. Dengan arti lain, petani lidah buaya sudah mampu berpikir secara lebih rasional dalam mengobati penyakit.

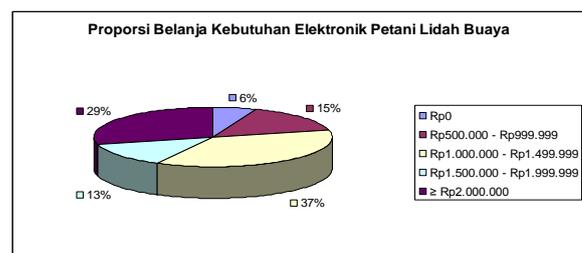


Gambar 8

Proporsi Belanja Kebutuhan Kesehatan per Bulan Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008
Sumber: Hasil Analisis, 2010

7. Belanja Kebutuhan Elektronik

Pada saat ini, elektronik mungkin telah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Sebagian besar petani memiliki beberapa barang elektronik dan sangat intensif dalam penggunaannya, khususnya *hand phone* dan televisi/radio. Jika dilihat dari aspek fisik wilayah, Kecamatan Pontianak Utara bisa dikatakan sebagai wilayah yang bercirikan perkotaan, terdapat banyak toko yang menjual barang elektronik bagi penduduk lokal. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Data belanja elektronik selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9

Proporsi Belanja Kebutuhan Elektronik per Tahun Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Gambar 10 memperlihatkan bahwa sebagian besar petani menghabiskan pendapatannya Rp1.000.000 – Rp1.499.999 per tahun untuk membeli barang elektronik (37 % dari 52

responden) dan hanya 6 % dari 52 responden yang tidak membeli barang elektronik karena mereka masih menumpang di rumah orang tua/keluarga. Dari 52 responden yang diwawancarai, 63,5 % petani membeli barang elektronik di dalam lokal kecamatan dan 36,6 % petani membelinya di Pusat Kota Pontianak. Selanjutnya diketahui bahwa total nilai belanja elektronik Rp.76.700.000 per tahun untuk 52 responden. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas belanja petani masih memberikan efek positif bagi pengembangan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara walaupun dalam nilai yang masih kecil.

8. Belanja Kebutuhan Komunikasi

Kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan lainnya yang mungkin mengalami perubahan fungsi (status) dari yang semula dianggap sebagai kebutuhan sekunder (bahkan tersier) menjadi kebutuhan utama (primer). Dalam hal ini, kita akan menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian isi ulang pulsa atas penggunaan alat komunikasi berupa telepon genggam (*hand phone*) dan daerah tempat pembelian pulsa tersebut.



Gambar 10

Proporsi Belanja Kebutuhan Komunikasi per Bulan Petani Lidah Buaya Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2008

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Gambar 11 menunjukkan bahwa sebagian besar petani (49 % dari 52 responden) memiliki besar biaya komunikasi berkisar Rp50.000 – Rp99.999, 23 % petani dengan

biaya komunikasi Rp100.000 ke atas, dan 15 % petani yang tidak memiliki alat komunikasi (*hand phone*). Bagi petani yang tidak memiliki *hand phone*, mereka biasanya menggunakan warung telekomunikasi (wartel) yang ada di pemukiman mereka.

Seluruh petani yang memiliki alat komunikasi (*hand phone*) membeli isi ulang pulsa di toko-toko yang ada di tempat tinggal mereka. Itulah mengapa, jika orang pergi ke Kecamatan Pontianak Utara dan melintasi Jalan 28 Oktober (jalan utama ke pemukiman petani), di sisi jalan banyak terdapat toko/kios yang menjual isi ulang pulsa beserta *hand phone*-nya. Total nilai belanja pulsa dari petani lidah buaya (84,62 % dari 52 responden) adalah Rp.31.440.000 per tahunnya. Jika diasumsikan proporsi nilai belanja di atas dapat berlaku untuk total 105 petani lidah buaya, maka kecamatan tersebut akan memperoleh pendapatan Rp.62.880.000 per tahunnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belanja kebutuhan komunikasi telah memberikan efek positif bagi ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara.

9. Belanja Kebutuhan Transportasi

Hasil wawancara diketahui bahwa 69,23 % petani (dari 52 responden) tidak menggunakan atau memiliki keterkaitan terhadap keberadaan transportasi umum di lokal kecamatan. Hal ini terjadi karena mereka menggunakan sepeda motor sebagai penunjang mobilitasnya. Transportasi umum yang ada di Kecamatan Pontianak Utara hanya berupa Bus dan Angkutan Kota (Angkot). Untuk mengirimkan lidah buaya ke PT. Niramas, petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi karena biasanya pihak pabrik yang datang membeli lidah buaya tersebut, begitu juga dengan industri pengolahan lidah buaya. Untuk memasarkan lidah buaya ke pasar-pasar lokal,

petani menggunakan sepeda motor yang dimilikinya, dan untuk melakukan pengiriman ke luar kota (ekspor), petani menggunakan jasa Terminal Agribisnis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dalam hal ini, petani tidak dikenakan biaya penggunaan jasa terminal melainkan hanya biaya pengepakan (*packing*).

Untuk petani yang tidak memiliki sepeda motor (30,8 % dari 52 responden), mereka menggunakan angkutan kota (angkot) untuk menunjang mobilitasnya terutama ke pusat kota, dengan pengeluaran berkisar Rp.150.000-Rp.300.000 per bulan. Total biaya transportasi untuk petani yang menggunakan angkutan kota adalah Rp.34.800.000 per tahun. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keterkaitan pertanian lidah buaya terhadap transportasi umum masih rendah, meskipun dari sisi nilai belanja masih memberikan efek positif bagi ekonomi lokal kecamatan.

5. Kesimpulan

Peran lidah buaya terhadap pendapatan Kecamatan Pontianak Utara masih rendah. Data menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi lidah buaya terhadap pendapatan wilayah hanya 1,7 % pada tahun 2004 (sepanjang tahun 2002 – 2006). Dalam hal ini, pembandingan yang digunakan adalah PDRB Kecamatan Pontianak Utara, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB wilayah. Ketiga sektor ini mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sementara itu, nilai tambah pertanian lidah buaya relatif lebih rendah karena sebagian besar produk olahan masih terbatas pada minuman kemasan dan untuk ekspor berupa lidah buaya mentah (nilai tambah rendah).

Data menunjukkan bahwa kontribusi lidah buaya terhadap tenaga kerja Kecamatan Pontianak Utara hanya 0,2 % sepanjang tahun 2005 – 2007. Dalam hal ini, pembandingan yang digunakan adalah total tenaga kerja wilayah, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh industri (karet dan kayu) dan pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa peran pertanian lidah buaya dalam menyerap tenaga kerja Kecamatan Pontianak Utara masih rendah.

Analisis kesejahteraan menunjukkan bahwa pertanian lidah buaya memberikan pendapatan sedikit lebih tinggi dari pendapatan per kapita Kota Pontianak. Sebagian besar petani menilai pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar, seperti: pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan kredit motor setiap bulannya. Selain itu, sebagian besar petani mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan sebelum menjadi petani lidah buaya. Dengan demikian, pertanian lidah buaya telah berperan bagi kesejahteraan petani meskipun dalam nominal yang relatif kecil. Analisis belanja petani menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas belanja berlangsung di dalam lokal kecamatan, meskipun untuk belanja pakaian, elektronik, dan kendaraan bermotor memiliki proporsi pembelian yang cukup tinggi di luar kecamatan. Dengan demikian, belanja petani telah memberikan efek positif bagi pengembangan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara.

Pertanian lidah buaya mendorong berkembangnya industri pengolahan lidah buaya yang saat ini setidaknya terdapat 15 unit di Kota Pontianak. Industri ini telah menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan wilayah. Namun, industri pengolahan lidah buaya masih berupa industri rumah tangga (*home industry*) dan masih terbatas pada produk olahan bernilai tambah rendah

(minuman kemasan atau diekspor berupa lidah buaya mentah). Selain itu, keterkaitan pertanian lidah buaya terhadap kegiatan penunjang (jasa keuangan dan transportasi) masih sangat rendah. Terlepas dari kondisi diatas, pertanian lidah buaya telah berperan dalam pengembangan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara melalui efek pengganda yang diciptakannya.

Industri pengolahan lidah buaya menyerap tenaga kerja dari lingkungan nya. Jika terdapat banyak industri yang berlokasi di luar kecamatan, kebocoran wilayah akan semakin besar (konsep PEL). Jumlah tenaga kerja industri lokal lebih besar daripada tenaga kerja industri non lokal. Hal ini berarti keberadaan industri pengolahan lidah buaya memberikan keuntungan bagi pengembangan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Hastu Prabatmodjo, Ir., MS., Ph.D untuk arahan dan bimbingan sehingga artikel ini dapat ditulis. Terima kasih juga kepada dua mitra bestari yang telah memberikan komentar yang berharga.

Daftar Pustaka

Argo, Teti, 2005. *Menguak Keberpihakan pada Perdesaan di Indonesia. Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan*. ITB

Blakeley, E.J., 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. New York : Sage Publication.

Coffey H. and M. Polece., 1985. *Local Development: Conceptual Bases and Policy Implication*. Regional Studies Volume 19.

Helmsing, A. H. J., 2001. *Local Economic Development. Draft Papers for The Cape Town Symposium*. Institute of Social Studies, Hague.

Hendayana, Rahmat, 2003. *Aplikasi Metode Location Quotient dalam Penentuan Komoditas Unggulan*. Bogor : Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi. Informatika Artikel Volume 12.

Laporan Akhir Penyusunan *Rolling Plan* Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak Tahun 2008 – Tahun 2013. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak.

Monografi Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2007. Pemerintah Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Utara.

Nuhung, Iskandar. 2003. *Membangun Pertanian Masa Depan*. Demak : CV. Aneka Ilmu

Nurzaman, Siti Sutriah, 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Kritis*. Bandung: Penerbit ITB.

PDRB Kota Pontianak Menurut Kecamatan. BAPPEDA Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak.

Pontianak Post, 2007.

Profil Agribisnis Aloe vera Kota Pontianak Tahun 2004. Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak.

Profil dan Deskripsi Investasi Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak.

Sugito, Ira Choeriah, 2006. *Prospek Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Bandung Barat : Kajian dari Perspektif Pengembangan Wilayah*. Tesis, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Bandung.

Sugiyanto, Catur, 2003. *Strategi Penyusunan Komoditas Unggulan Daerah*. PSE-KP Universitas Gadjah Mada.

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Butir-Butir Pemikiran Strategi Menghapus Kemiskinan Dalam Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.

Todaro, M., 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

World Bank, 2003, *Local Economic Development (LED) Quick Reference*. Washington D.C. : World Bank

